

REFLEKSI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN PERIODE 2005 - 2025

REFLECTION OF REGIONAL DEVELOPMENT RESULT OF BANTEN PROVINCE FOR PERIOD 2005 – 2025

Arta Rusidarma Putra^{1,*}, Silfiana², Raden Irna Afriani³

^{1,3}Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang – Jakarta, KM 03 No.1B, Penancangan Kec.Cipocok
Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia 42124

²Bappeda Provinsi Banten, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang,
Banten, Indonesia 42171

*Email: artar.putra@gmail.com

disubmit: 12 Oktober 2012, direvisi: 14 November 2023, diterima: 17 November 2023

ABSTRAK

Evaluasi pembangunan merupakan hasil dari suatu penilaian sasaran serta analisis permasalahan faktor keberhasilan pada suatu proses (*lesson learned*) dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Tujuan Penelitian adalah penilaian capaian pembangunan jangka panjang dengan sasaran pokok yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan jangka panjang daerah, dan menyusun rekomendasi penyusunan Rancangan Program Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten periode 2025-2045. Metode penelitian adalah studi literatur dengan data sekunder berupa hasil penelitian seperti artikel, buku, jurnal dan beberapa sumber lain yang relevan. Teknik analisis menggunakan analisis kesenjangan, content analysis dan analisis statistika. Hasil penelitian evaluasi indikator makro tahun 2005-2025 menunjukkan kinerja progresif pada indikator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, peningkatan Pengeluaran per Kapita, penurunan indeks gini dan peningkatan PDRB perkapita. Indikator penduduk miskin meningkat signifikan dan laju pertumbuhan ekonomi menurun periode 2020-2021 disebabkan dampak pandemi. Tahun 2022, penurunan penduduk miskin dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seiring proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kesimpulan adalah diperlukan keselarasan visi dan misi serta arah penyusunan kebijakan dan indikator pembangunan jangka panjang Provinsi dengan indikator kinerja pembangunan jangka panjang nasional dan indikator tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan perancangan program kegiatan seperti menyediakan lapangan kerja baru pada sektor ekonomi serta memberikan berbagai kemudahan untuk usaha kecil menengah dengan berkoordinasi, kolaborasi serta bersinergi antara seluruh perangkat daerah dengan berbagai pihak seperti akademisi dan praktisi sebagai upaya peningkatan capaian indikator makro ekonomi, kesejahteraan sosial dan mendapat inovasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Kata kunci: *Evaluasi, Indikator Makro, Program Jangka Panjang*

ABSTRACT

Development evaluation is an assessment of targets and analysis of problems and success factors in a process (lesson learned) of improving regional development policies at the next stage. The aim of the research is to assess long-term development achievements with the main targets that have been determined, identify the driving and inhibiting factors that can influence the achievement of regional long-term development, and prepare recommendations for the preparation of the Regional Long-Term Program Plan for Banten Province for the period 2025-2045. The research method is literature study with secondary data in the form of research results such as articles, books, journals and several other relevant sources. Analysis techniques use gap analysis, content analysis and statistical analysis. The results of research evaluating macro indicators for 2005-2025 show progressive performance in the indicators of increasing the Human Development Index, decreasing Open Unemployment Rate,

increasing per Capita Expenditure, decreasing Gini index and increasing GDP per capita. Indicators of the poor population have increased significantly and the rate of economic growth has decreased in the 2020-2021 period due to the impact of the pandemic. In 2022, the poor population will decrease and the rate of economic growth will increase in line with the post-pandemic economic recovery process. The conclusion is that it is necessary to align the vision and mission as well as the direction of policy formulation and provincial long-term development indicators with national long-term development performance indicators and indicators of sustainable development goals with the design of activity programs such as providing new jobs in the economic sector and providing various conveniences for small and medium businesses. by coordinating, collaborating and synergizing between all regional officials and various parties such as academics and practitioners as an effort to increase the achievements of macroeconomic indicators, social welfare and obtain innovation in long-term regional development plans.

Keywords: Evaluation, Macro Indicators, Long Term Program

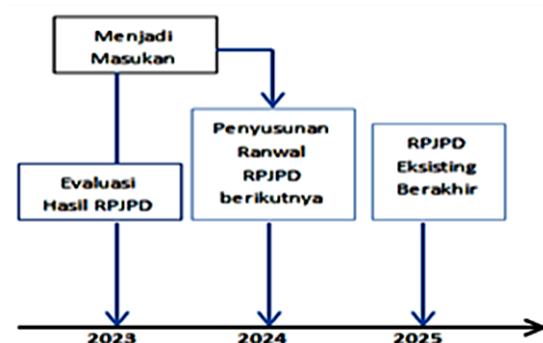
PENDAHULUAN

Pada instansi pemerintah, evaluasi biasanya digunakan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk meninjau kembali dengan lebih dalam terkait target dan sasaran suatu kegiatan yang kemudian dijadikan pedoman dalam merencanakan kegiatan yang akan diadakan pada periode berikutnya. Evaluasi merupakan suatu hubungan dari serangkaian kegiatan dimana masing-masing kegiatan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program kegiatan seperti: *appraisal*, *rating* dan *assessment* (Syukri & Widiastuti, 2021).

Selain itu, fakta lain terkait evaluasi Melton *et al.*, (2020) menemukan bahwa program Global Affairs Canada mengharuskan relevan dan selaras dengan kebutuhan dan prioritas kawasan suatu daerah, serta dengan kebijakan departemen.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 250 ayat (1) bahwa Kepala BAPPEDA Provinsi melaksanakan

evaluasi hasil RPJPD lingkup Daerah Provinsi dan selanjutnya pada ayat (3) Hasil evaluasi RPJPD Provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD Provinsi untuk periode berikutnya. Selanjutnya secara lebih teknis Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Surat edaran ini mengatur lebih rinci muatan-muatan dan tata cara serta mekanisme penyusunan evaluasi RPJPD yang harus termuat di dalam Laporan Evaluasi RPJPD 2005-2025. Hasil

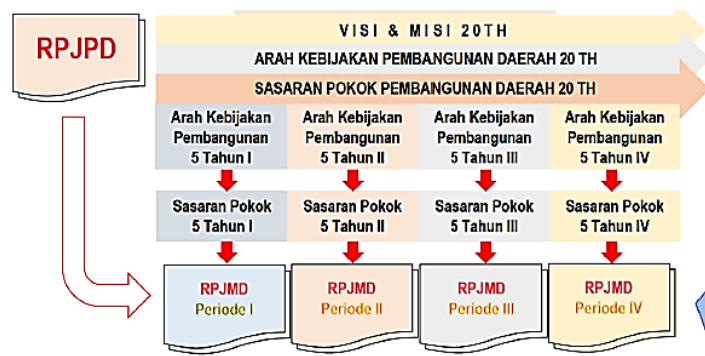


Gambar 1. Evaluasi hasil RPJPD menjadi masukan bagi penyusunan Ranwal RPJPD (Sumber: Alfirdaus *et al.*, 2020)

Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025,

Gambar 1 menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dijadikan masukan untuk penyusunan rencana awal RPJPD pada periode selanjutnya. Tindak lanjut dari dua hal tersebut Pemerintah Provinsi Banten melalui Bappeda menyusun Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang dilakukan dengan memperhatikan terfokus pada arah kebijakan dan sasaran pokok serta identifikasi berbagai faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian dilakukan perbandingan antara target dan realisasi RPJMD dan menerjemahkan indikator yang lebih relevan sesuai dengan narasi arah suatu kebijakan dan sasaran pokok yang terkandung dalam RPJPD 2005-2025.

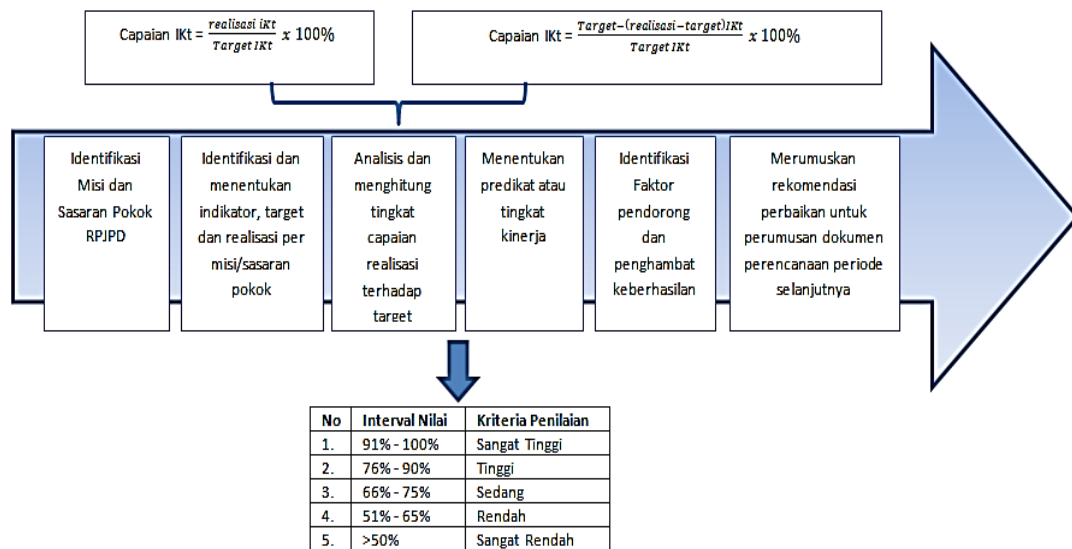
Tujuan Evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah: 1) Penilaian capaian pembangunan jangka panjang periode tahun 2005-2025 dengan sasaran pokok yang telah ditetapkan; 2) Identifikasi berbagai pendorong dan penghambat yang berpengaruh pada tingkat pencapaian pembangunan dalam jangka panjang daerah selama periode 2005-2025;



Gambar 2. Hubungan antara RPJPD dan RPJMD
Sumber: BAPPEDA-Tangerang (2008)

3) Penyusunan rekomendasi untuk RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Pada gambar 2, visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun selama dua puluh tahun kedepan didapat dari hasil evaluasi RPJPD yang dibagi menjadi empat periode, dimana pada periode pertama terdiri dari lima tahun RPJMD.

Dalam evaluasi terdiri dari dua aspek yang berhubungan dalam penggunaan berbagai macam metode untuk melihat hasil kebijakan publik, program yang sudah berjalan, dan pengaplikasian serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap orang, kelompok, atau masyarakat yang bersifat menyeluruh. Namun dalam aspek yang saling berhubungan mengandung fakta dan berbagai premis terkait dengan nilai dalam setiap tuntutan *evaluative*. Tetapi banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan yang pada dasarnya bersifat non evaluatif atau aktivitas yang



Gambar 3. Tata Cara Analisis Kesenjangan
 Sumber: (Dalglish *et al.* (2016))

berjalan terutama pada tuntutan designative (faktual) daripada tuntutan evaluative. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendekatan terkait “evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Permatasari, 2020). Hasil evaluasi atau capaian menggunakan tata cara analisis kesenjangan dengan realisasi berbanding target sebagaimana dijelaskan pada gambar 3. Nilai tersebut didapat dari beberapa tahapan mulai dari identifikasi Misi RPJPD, penentuan indikator, analisis tingkat capaian, penentuan tingkat kinerja berdasarkan tabel interval nilai, identifikasi faktor pendorong dan penghambat, kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan dari kekurangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan data sekunder untuk

melakukan evaluasi yang digunakan pada Evaluasi RPJPD Provinsi Banten dengan mengarah pada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ. Sesuai aturan tersebut, jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi kinerja melalui teknik analisis kesenjangan (*Gap Analysis*) dan analisis isi (*Content Analysis*).

Gap analysis dilakukan sebagai perbandingan antara capaian hasil kinerja dan target kinerja yang sudah ditentukan dan harus dicapai. Melalui evaluasi kinerja diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Provinsi Banten terhadap pencapaian target RPJPD Provinsi Banten beserta permasalahan dan kendala yang dihadapi. Surat Edaran Mendagri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ mengatakan bahwa analisis

kesenjangan dilakukan untuk mengukur kinerja dan interpretasi predikat kerja dengan tahapan dan formula yang disajikan pada Gambar 3.

Analisis Isi (*Content Analysis*) adalah teknik bersifat kualitatif yang terfokus pada keajekan dari isi komunikasi, makna dari isi komunikasi, pembacaan dari berbagai simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi pada proses komunikasi (Hainun *et al.*, 2022). Dalam analisis isi kualitatif dilakukan pengklasifikasian atau penyaringan pada teks atau kata ke sejumlah kategori yang mewakili sejumlah isi tertentu (Riswandi & Puspitasari Rochman, 2023). Dalam penelitian ini dilakukan peninjauan keselarasan antar dokumen perencanaan yang ada, yaitu menyandingkan RPJPD dengan RPJMD Provinsi Banten. Analisis keselarasan antara RPJPD dan RPJMD ini bertujuan untuk memastikan kembali bahwa tahapan dalam RPJPD ini telah terakomodir di dalam RPJMD sehingga menjamin terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD.

Evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 juga dilakukan melalui survei persepsi masyarakat Provinsi Banten terhadap kinerja pembangunan sebagai pengayaan untuk proses perumusan rekomendasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistika seperti: Eksplorasi dan *Text Analysis*. Peran dari teknik analisis eksplorasi ini dilakukan untuk menggali

informasi terkait sebaran data, pola data, anomali pada data, serta karakteristik lainnya pada data yang diteliti. *Text Analysis* melalui beberapa tahapan, di antaranya tahapan pra-proses. Praproses dilakukan untuk mengubah data mentah yang sudah diambil melalui tahapan *scraping* menjadi data yang lebih terstruktur agar memudahkan sistem pada proses klasifikasi. Tahapan praproses data terdiri dari *cleaning*, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, *stopwords removal* dan *stemming*. Token yang digunakan bersifat unigram atau terdiri dari satu kata. Kamus yang digunakan untuk membantu proses analisis ini ada kamus *Colloquial Indonesian Lexicon* untuk proses normalisasi, gabungan dari kamus sastrawi dan natural *language toolkit* (NLTK) untuk proses *stopwords removal*, dan kamus sastrawi sebagai daftar kata dasar dalam proses *stemming*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Indikator Makro RPJPD Provinsi Banten Periode 2005 – 2025

Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 menunjukkan seluruh indikator makro yang dicapai bersifat progresif, mengalami kemajuan atau peningkatan selama periode tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan SE Menteri Dalam Negeri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ mengamanatkan



Gambar 4. Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

dalam evaluasi RPJPD, daerah agar menyajikan realisasi terhadap indikator makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, Ketimpangan Pendapatan dan PDRB perkapita. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan perwujudan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai dimensi. Ukuran kesejahteraan tersebut selanjutnya dinilai dan dibandingkan dengan cukup komprehensif.

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Nasional.

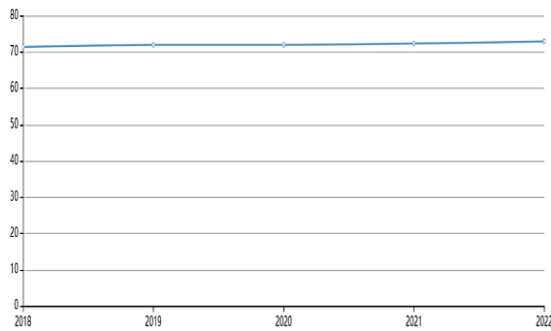
Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran pencapaian pembangunan berbasis pada beberapa komponen dasar kualitas hidup yang

dihitung berdasarkan data yang menggambarkan ke empat komponen, diantaranya angka harapan hidup untuk mengukur keberhasilan bidang kesehatan, angka melek huruf dan *average* lama bersekolah guna mengukur keberhasilan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang bisa dilihat berdasarkan *average* besaran pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan untuk hidup layak (Statistik & BPS, 2020).

Perkembangan IPM mengalami tren peningkatan di Tahun 2010 hingga 2022 sebagaimana disajikan pada gambar 4.

Tahun 2010 IPM Provinsi Banten mencapai 67,54 dan meningkat mencapai angka 73,32 di Tahun 2022. Kinerja tersebut melampaui IPM Nasional dan mencerminkan keberhasilan Provinsi Banten dalam bidang pembangunan sumber daya manusia IPM Provinsi Banten di Tahun 2022 karena termasuk kategori “tinggi”. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91 poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Hal ini mengartikan bahwa akses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk Banten bisa lebih meningkat.



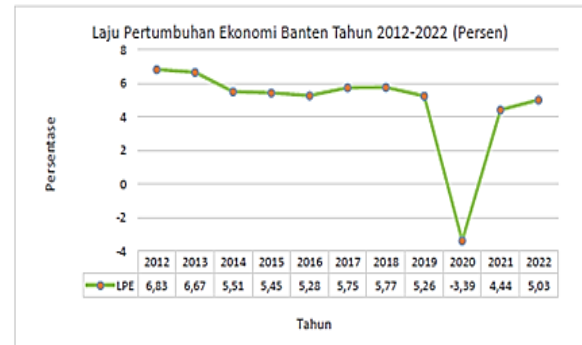
Gambar 5. Data IPM Nasional 2018 – 2022
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Sebagai faktor pendorong adalah adanya topangan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan berbagai urusan yang mampu menaikkan nilai IPM pada periode RPJMD 2017-2022. Sementara faktor penghambatnya adalah terdapat kendala dari penggunaan data baseline yang menggunakan data pada Tahun 2010 dikarenakan data IPM belum ada pada Tahun 2007.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi adalah upaya dalam meningkatkan kapasitas produksi guna memperoleh penambahan output yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah (Adisasmita, M.Ec, 2014).

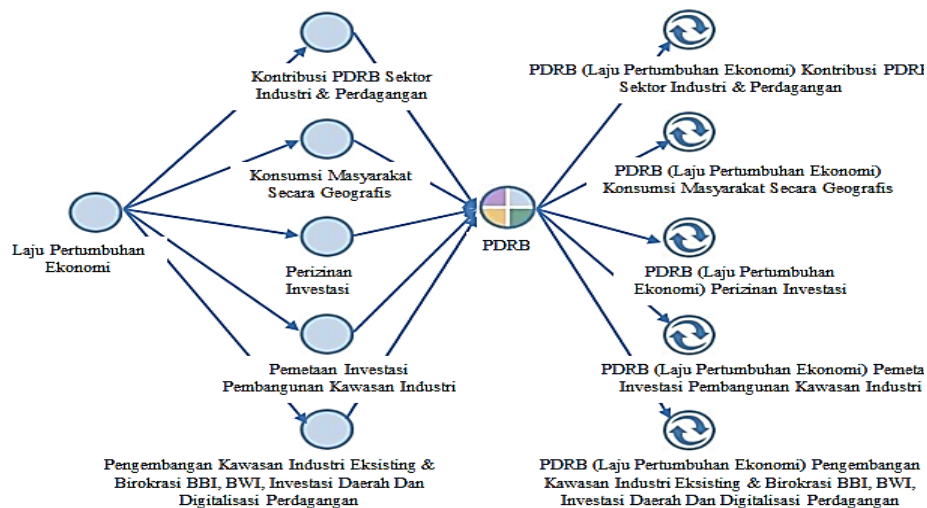
Pada gambar 6, perkembangan LPE mengalami fluktuasi sejak Tahun 2012 hingga 2022. Pada Tahun 2012 LPE Provinsi Banten sebesar 6,83 dan mengalami perlambatan mulai dari Tahun 2013 lalu



Gambar 6. Perkembangan LPE Provinsi Banten Tahun 2012-2022. Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

menurun tajam akibat pandemi di tahun 2020 yang memukul perekonomian berbagai sektor, lalu mulai pulih kembali di Tahun 2021 sampai Tahun 2022 sudah berada pada realisasi sebesar 5,03 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan pada gambar 7 didukung oleh berbagai faktor antara lain (Badan Pusat Statistik, 2022): 1) Mempermudah perizinan sehingga investasi di Provinsi Banten pada Tahun 2022 naik, target investasi sebesar 53,9 triliun telah realisasi sebesar 80,2 triliun terdiri atas PMA sebesar 48,9 triliun dan PMDN sebesar 31,20 triliun. Hal ini ditunjang dari masuknya investasi dari proyek skala besar antara lain Lotte Chemical dan Indo Raya Tenaga; 2) Pemerataan investasi dan pembangunan kawasan industri baru sesuai RT/RW Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; 3) Pengembangan kawasan industri eksisting di wilayah Banten utara, dan birokrasi berdampak



Gambar 7. Analisis Faktor LPE
 Sumber: Data diolah dengan NVivo

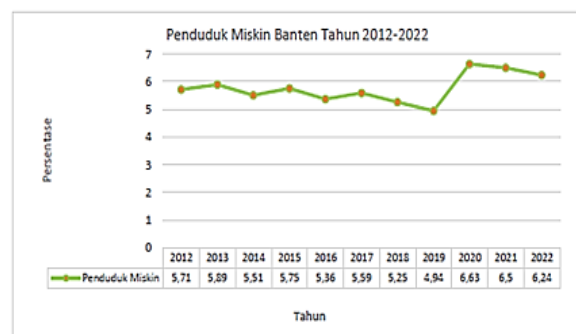
dengan menguatkan Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata Indonesia (BWI), investasi daerah, digitalisasi perdagangan; 4) Mendorong konsumsi masyarakat sesuai arahan presiden secara geografis Provinsi Banten berada pada posisi yang sangat strategis dan didukung dengan infrastruktur konektivitas antar wilayah berupa pelabuhan, bandara dan jalan tol; 5) Kontribusi PDRB Provinsi Banten yang secara dominan adalah sektor industri dan perdagangan yang relatif tumbuh dengan baik pasca pandemi (terjaga).

Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan adalah permasalahan klasik dan rumit yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, diantaranya tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap

barang dan jasa, lokasi, letak geografis, gender, dan lokasi lingkungan masyarakat (Nasution, 2019).

Data statistik pada Gambar 8 menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berhasil menekan angka kemiskinan, sehingga tetap berada dibawah nasional, penduduk miskin Provinsi Banten Tahun 2022 mencapai angka 6,24 persen, sedangkan nasional sebesar 9,57 persen. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Banten terjadi antara Tahun 2020-2022



Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2012-2022
 Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

dengan angka paling signifikan terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 857,64 ribu jiwa disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menjadi faktor penghambat penurunan angka kemiskinan.

Upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain yang juga melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain yang juga dijadikan sebagai faktor pendukung penurunan angka kemiskinan adalah: 1) Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang dan jasa semakin meningkat. 2) Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3) Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

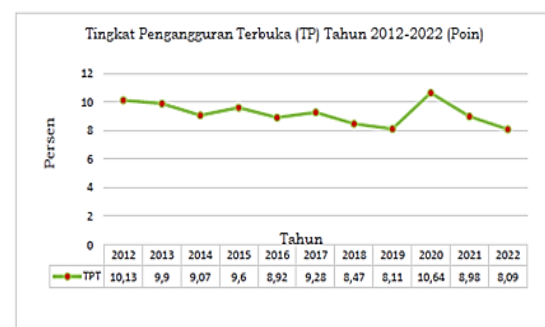
Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu nilai atau persentase dari jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja (Waluyo, 2017) Penyebab terjadinya pengangguran biasanya karena banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan (Permadhy & Sugianto, 2020)

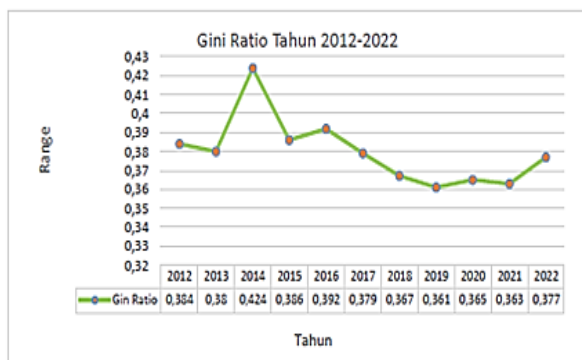
Data statistik pada gambar 9 menunjukkan bahwa Provinsi Banten

selama kurun waktu Tahun 2012-2022 fluktuatif, namun secara progresif penurunan TPT dari Tahun 2012 sebesar 10,13 persen menurun menjadi 8,09 persen di Tahun 2022. Kenaikan TPT yang signifikan terjadi di Provinsi Banten pada Tahun 2020 sebesar 10,64 persen, ini akibat pandemi Covid 19 juga menjadi faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran karena memicu banyak PHK dan banyak UMKM yang gulung tikar akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pada Tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi, TPT di Banten berangsur menurun.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai pendukung penurunan TPT antara lain: 1). Pendidikan sekolah vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri. Salah satu contohnya adalah SMK dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran); 2).



Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2022 Provinsi Banten
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)



Gambar 10. Gini Ratio Tahun 2012-2022
Provinsi Banten

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia; 3). Secara regulasi terdapat Pergub Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret mengatasi pengangguran dari lulusan SMK; 4). Pendirian beberapa SMK; 5). Pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK; 6). Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

Indeks Gini

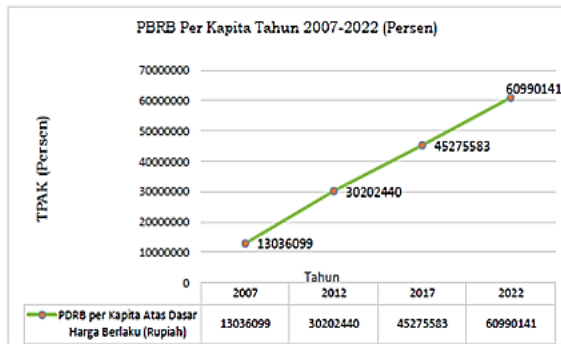
Indeks Gini adalah salah satu indikator yang dipakai guna mengetahui kesejahteraan antar individu dan pemerataan pengeluaran pada wilayah tertentu (*income disparity*) (BPS, 2021).

Pada Gambar 10 menggambarkan perkembangan Gini Ratio mengalami tren penurunan progresif sejak Tahun 2012 hingga 2022. Tahun 2012 Gini ratio Provinsi Banten adalah 0,384 dan terjadi penurunan

0,377 pada Tahun 2022. Gini Ratio September 2022 yang mencapai sebesar 0,377 poin berarti termasuk pada ketimpangan sedang.

Tercatat bahwa pengeluaran perkapita perbulan sebanyak 20% kelompok penduduk berpengeluaran tinggi di bulan September 2022 dan mengalami peningkatan 1,49%, sementara pengeluaran per kapita perbulan sebanyak 40% kelompok penduduk berpengeluaran terendah dan kelompok 40% berpengeluaran menengah mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377.

Faktor penghambat capaian indeks gini adalah adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian berhenti. Berhentinya kegiatan perekonomian ini tentu saja mengakibatkan pada sulitnya pemerataan ekonomi karena fokus Pemerintah Provinsi terpusat pada penanganan pandemi. Akan tetapi, selama periode 2017–2022, dihasilkan dari keseluruhan unit usaha atau merupakan hasil penjumlahan dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah dalam suatu periode waktu.



Gambar 11. PDRB Perkapita Tahun 2007-2022 Provinsi Banten Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

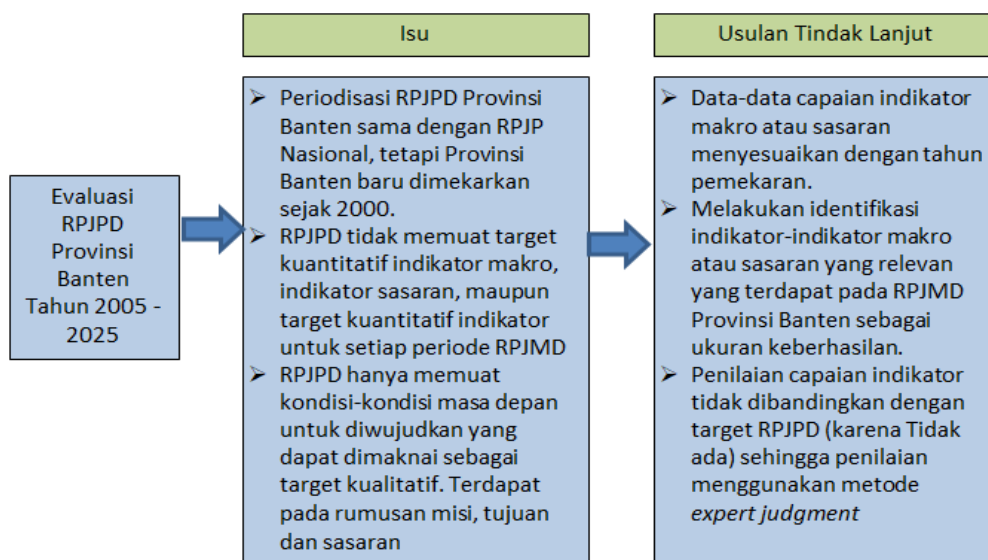
PDRB ini menunjukkan bagaimana barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi, kebutuhan ekspor, maupun disimpan sebagai persediaan untuk kemudian dijual di periode selanjutnya (BPS, 2021). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan data Badan Pusat Statistik pada gambar 11,

PDRB per kapita masyarakat Provinsi Banten menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya mulai dari Tahun 2007 sebesar 13.036 juta rupiah hingga 2022 yaitu sebesar 60.990 juta rupiah.

Tantangan ke depan bagi Pemerintah Provinsi Banten yaitu terus berupaya merangsang dan memacu pertumbuhan terutama pada sektor ekonomi lain yang berpotensi meningkatkan pemerataan pendapatan dan menurunkan tingkat pengangguran masyarakat dan juga dituntut agar mampu mengidentifikasi dan memahami karakteristik dan potensi daerah yang dapat menjadi faktor pendorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Gambar 12 menerangkan bahwa Evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005 sampai 2025 terkait isu periodisasi



Gambar 12. Gambaran Rekomendasi Tindak Lanjut Proses Evaluasi
 Sumber: Hasil Pengolahan Data

RPJPD provinsi dan nasional yang sama, target kuantitatif indikator makro, sasaran tidak termuat dalam RPJPD yang hanya memuat kondisi masa depan untuk diwujudkan dan dimaknai dengan target kualitatif. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, maka dilakukan data capaian indikator makro dan sasaran harus disesuaikan dengan tahun pemekaran, Melakukan identifikasi terhadap indikator makro atau sasaran yang relevan pada RPJMD provinsi Banten dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Selain itu, penilaian capaian menggunakan metode *expert judgment* karena capaian indikator tidak bisa dibandingkan dengan target RPJPD.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten periode 2005-2025, dapat disimpulkan bahwa indikator makro tahun 2005-2025 menunjukkan kinerja progresif pada indikator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini menurun. Sementara itu, terjadi peningkatan Pengeluaran per Kapita dan PDRB perkapita.

Indikator penduduk miskin meningkat signifikan dan laju pertumbuhan ekonomi menurun periode 2020-2021 disebabkan dampak pandemi.

Tahun 2022, penurunan penduduk miskin dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seiring proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, dapat disusun beberapa rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJPD Provinsi Banten periode 2005-2025 dengan fokus penelitian adalah indikator kinerja makro dan sub fokus penelitian diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan ekonomi, Gini Ratio dan PDRB adalah:

1. Perlunya keselarasan visi dan misi serta arah penyusunan kebijakan dan indikator pembangunan jangka panjang Provinsi dengan indikator kinerja pembangunan jangka panjang nasional dan indikator tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan perancangan program kegiatan seperti menyediakan lapangan kerja baru pada sektor ekonomi serta memberikan berbagai kemudahan untuk usaha kecil menengah dengan berkoordinasi
2. Berkolaborasi serta bersinergi antara seluruh perangkat daerah dengan berbagai pihak seperti akademisi dan praktisi sebagai upaya peningkatan capaian indikator makro ekonomi, kesejahteraan sosial dan mendapat

inovasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, M.Ec, P. D. R. (2014). *Ekonomi Tata Ruang Wilayah. GRAHA ILMU.*
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Manar, D. G., Pemerintahan, I., Politik, D., Ilmu, F., & Politik, I. (2020). Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan. *Jurnal Pengabdian Vokasi, 01(04).*
- Badan Pusat Statistik. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Statistik Indonesia 2022, 1101001.*
- BAPPEDA-Tangerang. (2008). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang. In *Tangerang BAPPEDA: Vol. I.*
- BPS, I. (2021). Badan Pusat Statistik Indonesia 2020. In *Statistik Indonesia 2020 (Vol. 1101001).*
- Dalglish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M. J., Perkins, N., Barrett, L. F., Barnard, P. J., Au Yeung, C., Murphy, V., Elward, R., Tchanturia, K., & Watkins, E. (2016). Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016. In *Journal of Experimental Psychology: General (Vol. 136, Issue 1).*
- Hainun, H., Haeruddin, H., & Basir, A. (2022). Literature Review: Model Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) Pada Pembelajaran Matematika. *Primatika : Jurnal Pendidikan Matematika, 11(1).* <https://doi.org/10.30872/primatika.v11i1.796>
- Handalani, R. T. (2018). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2(2).*
- Melton, N., Aksen, J., & Moawad, B. (2020). Which plug-in electric vehicle policies are best? A multi-criteria evaluation framework applied to Canada. *Energy Research and Social Science, 64.* <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101411>
- Muhammad Ernanda, Hutagaol, M. P., & Zulva Azijah. (2021). Determinan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Dan Alternatif Kebijakannya. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 29(2).* <https://doi.org/10.14203/jep.29.2.2021.131-146>
- Nasution, Z. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN), 1(2).* <https://doi.org/10.36987/ecobi.v1i2.20>
- Noviar, N. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 5(1).* <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>
- Permadhy, Y. T., & Sugianto. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Ikra-Ith Ekonomika, 2(3).*
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government, 1(1).*
- Putra, A. R., & Silfiana, S. (2019). Development Strategy Of Potential Village To Be Village Of Education Tourism In Bumi Jaya Village (Case Study of Bumi Jaya Pottery Craft Center in Ciruas District, Serang Regency). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 3(1).*

- <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i1.51>
- Putra, A. R., & Silfiana, S. (2023). Motivasi Orang Tua Dalam Memilih Sekolah di SDIT Banten Islamic School Kramatwatu Serang Banten. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.61231/miftah.v1i1.68>
- Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2>
- Riswandi, D., & Puspitasari Rochman, G. (2023). Identifikasi Prinsip Ekowisata Pada Pengembangan Desa Wisata Cibeusi, Kabupaten Subang. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i1.6077>
- Statistik, B. P., & BPS. (2020). Badan Pusat Statistik 2019. *Badan Pusat Statistik, XXII, 05 N(17/02/Th. XXIV)*.
- Subki, S., Sjafari, A., & Arenawati, A. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1). <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.167>
- Syukri, A. F., & Widiastuti, W. (2021). Evaluasi kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5470>
- Waluyo, J. (2017). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(3). <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i3.4151>